



Njo Investasi
Mayar Izine
DPMPTSP MENUJU WBBM

#AKHLAK

bangga
melayani
bangsa



RENJA RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2027



HUBUNGI KAMI :

dpmptsp.temanggungkab.go.id

[dpmptsp.temanggungkab](https://www.instagram.com/dpmptsp.temanggungkab)

[dpm_temanggungkab](https://www.facebook.com/dpm_temanggungkab)

Jl. Jenderal Sudirman No.41-42, Temanggung



+62 851-8484-1817

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Kepala Bidang
Perencanaan, Ekonomi, Sumber Daya
Alam dan Infrastruktur



Ir. GUNADI, MM
NIP. 19680721 200701 1 017

Verifikator



YEHEZKIEL ESANDA PUTRA, S.I.P
NIP. 19990103 202202 1 001

Mengetahui

**KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan landasan bagi seluruh penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran progres pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan;
3. Merupakan petunjuk atas target kinerja program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

Semoga Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2027 bisa dijadikan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, sekaligus perwujudan amanat yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 20 Juli 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pemangku Utama Muda/IV.c
NIP. 196812101990011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum 7

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 10

 1.4 Sistematika Penulisan..... 10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 12

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dan Capaian Renstra
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tahun 2025-2029. 12

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu 21

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
 Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 31

 2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD 36

 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 37

 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

 2.7 Inovasi Perangkat Daerah 44

 2.8 Penghargaan..... 46

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 48

 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 48

 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu 48

 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu 51

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 60

 4.1 Program dan Kegiatan..... 60

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 65

 5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027..... 65

 5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 65

BAB VI PENUTUP..... 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
 s.d Tahun 2026 Kabupaten Temanggung..... 13

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten
 Temanggung..... 22

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten
 Temanggung..... 23

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten
 Temanggung..... 23

Tabel 2.5 Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025 36

Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027 38

Tabel 2.7 Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku
 Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Temanggung 44

Tabel 2.8 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2023-2026..... 44

Tabel 2.9 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
 Tahun 2024-2026..... 46

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Temanggung Tahun 2027 50

Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung
 Tahun 2027 53

Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Temanggung Tahun 2027 61

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027..... 65

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

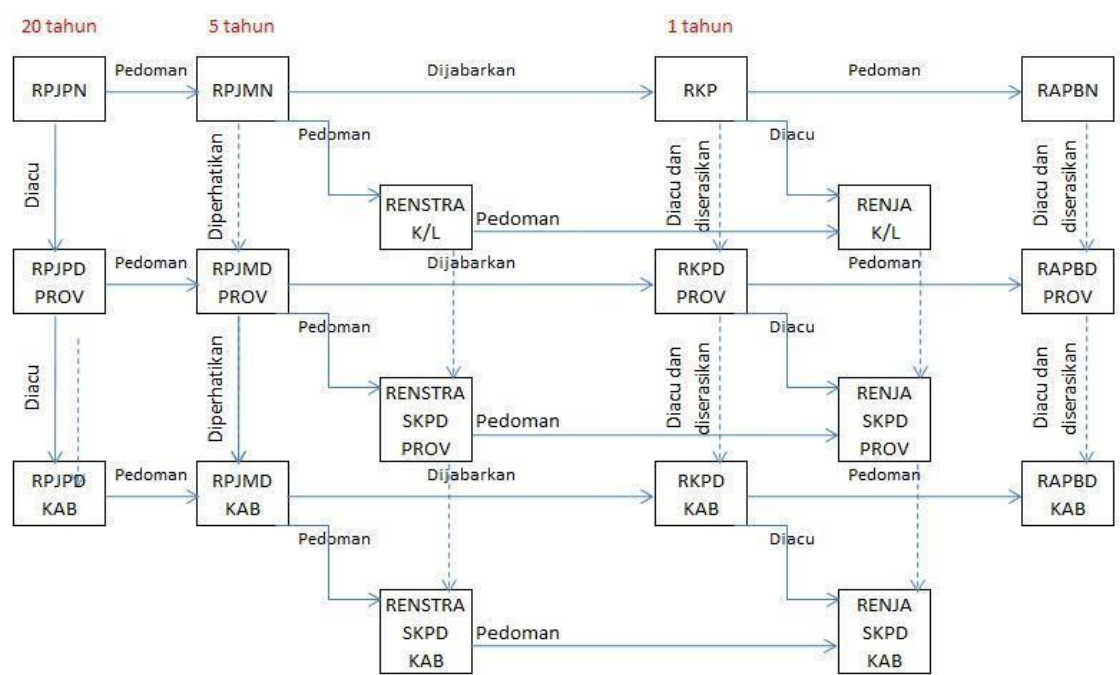
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;
- 5) Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi urusan terkait).

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimaksudkan

untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah

tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

- Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor xx Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu Tahun 2027;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
BAB	III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB	V	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB	VI	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026 Kabupaten Temanggung

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
	Urusan	Pemerintah									
	Bidang Urusan	Penanaman Modal									
A	Sasaran										
	Meningkatnya laju investasi dan kualitas pelayanan publik										
		Meningkatnya Kemudahan berinvestasi									
2.18.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Administrasi Keuangan Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah									
	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	33	33	100	7	0	1	0	14
2.18.01.202	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	216	244	113	238	2.345.666.263	60	638.316.709	25
2.18.01.205	Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	150	100	150	100.000.000	-	1.192.500	0
2.18.01.206	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	342	342	100	342	105.000.000	86	5.961.995	39
2.18.01.207	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	11	100	9	95.247.975	-	0	0
2.18.01.208	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	16	16	100	48	549.038.100	12	103.428.269	25

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
2.18.01.209	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	12	100	16	89.500.000	4	4.533.07	25
2.18.02	Program pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap Taret Investasi	Persen	90	100	100	92	54.400.000	27	0	27
2.18.02.201	Kegiatan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	Dokumen	-	-	-	1	10.000.000	-	-	-
2.18.02.202	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	1	44.500.000	-	-	-
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Persen	90	100	100	92	80.000.000	100	1.971.000	100
2.18.03.201	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlh Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Dokumen	1	1	100	1	80.000.000	1	1.971.000	100
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	Persen	90	100	100	92		100		100
		Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	90	100	100	92		100		100
218.04.201	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	4100	13.779	336	11.050	76.000.000	8.722	3.815.000	79

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/ 5	8	9	10	11	12=10/ 8
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	Persen	90	100	100	92	45.000.000	100	300.000	100
2.18.05.201	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Pelaku Usaha	92	92	100	115	45.000.000	6	300.000	5,2

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, 2026

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai indikator tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah dengan target sebanyak 33 dokumen. Realisasi yang dicapai sebanyak 33 dokumen, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 persen.
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki indikator kinerja berupa jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan, dengan target sebanyak 150 orang. Pada Tahun 2025, realisasi mencapai 150 orang atau sebesar 100 persen, sehingga target kinerja dapat tercapai sepenuhnya. Sementara itu, pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan sebanyak 150 orang belum terealisasi karena pelaksanaan sosialisasi belum dilaksanakan pada periode tersebut. Meskipun demikian, dari sisi keuangan telah terdapat realisasi sebesar Rp1.192.500,00, yang merupakan biaya operasional untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai indikator administrasi umum perangkat daerah dengan target sebanyak 342 paket. Realisasi mencapai 342 paket, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 persen.
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai indikator jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan target 11 unit. Realisasi mencapai 11 unit, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 persen.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai indikator penyediaan jasa penunjang

urusan pemerintahan daerah dengan target sebanyak 16 laporan. Realisasi mencapai 16 laporan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 persen.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai indikator jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 12 unit. Realisasi mencapai 12 unit, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 persen.

b. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan target 1 dokumen. Realisasi mencapai 1 dokumen, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 persen.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator terlaksananya pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dengan target sebanyak 4.100 layanan. Realisasi mencapai 13.779 layanan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 336 persen atau melampaui target yang telah ditetapkan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator terkendalinya pelaksanaan penanaman modal dengan target sebanyak 92 pelaku usaha. Realisasi mencapai 92 pelaku usaha, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 persen.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai indikator jumlah orang yang menerima gaji dan

tunjangan ASN dengan target sebanyak 216 orang/bulan. Realisasi mencapai 244 orang/bulan atau 113 persen, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

b. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator terlaksananya pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dengan target sebanyak 4.100 layanan. Realisasi mencapai 13.779 layanan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 336 persen atau melampaui target yang telah ditetapkan.

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator terkendalinya pelaksanaan penanaman modal dengan target sebanyak 92 pelaku usaha. Realisasi mencapai 92 pelaku usaha, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 persen.

3. Realisasi program/kegiatan tidak ada yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota belum memiliki target pelaksanaan pada tahun evaluasi sehingga belum terdapat realisasi yang dapat diukur.
- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota juga belum memiliki target pelaksanaan pada tahun evaluasi sehingga belum terdapat capaian kinerja yang dapat dinilai.
- Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025, tidak terdapat program maupun kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

4. Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- a. Tercapainya target kinerja program dan kegiatan didukung oleh perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antarbidang, komitmen pelaksanaan kegiatan serta optimalnya pengelolaan sumber daya yang tersedia sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 - b. Capaian yang melebihi target pada beberapa kegiatan dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN dibandingkan dengan target awal serta meningkatnya jumlah permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan dari masyarakat maupun pelaku usaha. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan pelayanan publik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:
 - a. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, seluruh program dan kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, bahkan beberapa kegiatan menunjukkan capaian yang melebihi target. Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa target kinerja program dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sampai dengan akhir Tahun 2026 diperkirakan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 - b. Capaian kinerja yang baik menjadi dasar dalam penyusunan Renja Tahun 2027 dengan tetap mempertahankan program dan kegiatan yang telah berjalan efektif serta melakukan penyempurnaan terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga konsistensi pencapaian indikator kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat iklim investasi, serta mendukung pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah secara optimal pada akhir periode Tahun 2029.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan melalui penyusunan target kinerja yang lebih terukur, realistis,

dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan serta potensi investasi daerah.

- b. Melakukan penyesuaian alokasi anggaran pada kegiatan yang menunjukkan realisasi melebihi target, khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan, agar kebutuhan pelayanan masyarakat dan pelaku usaha dapat diakomodasi secara optimal.
- c. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar bidang serta dengan perangkat daerah terkait guna mendukung Pelaksanaan Program Penanaman Modal, Promosi Investasi, dan Pelayanan Perizinan secara lebih efektif dan efisien.
- d. Mengoptimalkan pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala untuk memastikan pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- e. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, pengelolaan data penanaman modal, serta penyediaan informasi investasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan kemudahan berusaha.
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis guna mendukung profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai 100%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Proyek Investasi dengan Indikator Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN dengan target 5.010 proyek dan pada tahun 2025 terealisasi sebanyak 13.586 proyek.

2. Meningkatnya Jumlah Layanan di MPP (Mal Pelayanan Perizinan) dari target 1 layanan tercapai 5 layanan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Secara keseluruhan hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berada pada kategori sangat baik. Seluruh program dan sebagian besar kegiatan berhasil memenuhi target kinerja, sementara beberapa kegiatan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Promosi Investasi, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Serta Penguatan Tata Kelola Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan Renja Tahun 2027 dengan tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai serta melakukan penyempurnaan terhadap perencanaan, penganggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan agar sasaran Renstra Perangkat Daerah dapat tercapai secara optimal.

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, Indikator Standar Pelayanan dan Indikator Kinerja Kunci. Adapaun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.2 -2.5 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW I 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/S/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintah									
Bidang Urusan Penanaman Modal									
INDIKATOR KINERJA UTAMA									
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	93	94	95	94,19	94	100	ST
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	79	83	84	81,5	81,5	98,19	ST
3	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Milyar	2.150	2.152	2.155	2.159	544	0	SR
4	Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan	Persen	90	92	93	100	100	100	ST
5	Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN	Proyek	5.010	5.020	5.030	5.040	3.084	61,43	R
6	Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP	Layanan	1	2	3	6	0	0	SR
INDIKATOR PROGRAM									
1	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	Persen	90	92	94	100	25	27,48	SR
2	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Persen	90	92	94	100	100	100	ST
3	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	Persen	90	92	94	100	100	100	ST
4	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	90	92	94	100	100	100	ST
5	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	Persen	90	92	94	100	20	0	SR

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/S/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan									
Bidang Urusan Penanaman Modal									
INDIKATOR SPM									
1	Nihil								
2									

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/S/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan									
Bidang Urusan Penanaman Modal									
INDIKATOR IKK									
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	Persentase	0,60	0,70	0,80	0,65	0,26	26%	SR

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, 2026

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nilai IKM Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025, target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 93 berhasil dilampaui dengan realisasi 94,19 atau mencapai 100% (Sangat Tinggi). Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh DPMTSP telah memenuhi harapan masyarakat.

Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan, penerapan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi pelayanan berbasis elektronik.

Hambatan yang masih dihadapi antara lain meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan perlunya peningkatan sarana pendukung pelayanan.

Pada Tahun 2026 ditargetkan nilai IKM meningkat menjadi 94. Dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, target tersebut diproyeksikan dapat dicapai melalui peningkatan inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi petugas pelayanan, serta tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara berkelanjutan.

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Target Nilai AKIP Tahun 2025 sebesar 79 berhasil dilampaui dengan realisasi 81,5 atau sebesar 103,16% (Sangat Tinggi). Pencapaian tersebut menunjukkan semakin baiknya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terutama pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja.

Faktor penghambat yang masih perlu mendapat perhatian adalah tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dan penyempurnaan kualitas pengukuran indikator kinerja.

Pada Tahun 2026 ditetapkan target sebesar 83. Target tersebut diproyeksikan dapat dicapai melalui penguatan implementasi SAKIP, peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

3. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Target realisasi investasi Tahun 2025 sebesar Rp2.150 miliar berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar Rp2.159 miliar atau mencapai 100,42% (Sangat Tinggi). Keberhasilan tersebut didukung oleh meningkatnya minat investor, kemudahan pelayanan perizinan berusaha, promosi investasi, serta pendampingan kepada pelaku usaha.

Hambatan yang masih dihadapi meliputi dinamika perekonomian nasional dan global, persaingan investasi antar daerah, serta waktu realisasi proyek investasi yang relatif panjang.

Pada Tahun 2026 ditargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.152 miliar. Dengan melihat tren investasi dan capaian tahun sebelumnya, target tersebut diproyeksikan dapat tercapai apabila promosi investasi terus ditingkatkan, pelayanan perizinan dipercepat, dan pendampingan kepada investor dilakukan secara berkesinambungan.

4. Persentase Layanan yang Memenuhi Standar Waktu Pelayanan

Pada Tahun 2025 target sebesar 90% berhasil dilampaui dengan realisasi 100% atau mencapai 111,11% (Sangat Tinggi). Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh layanan telah memenuhi standar waktu pelayanan yang ditetapkan.

Hambatan yang perlu diantisipasi adalah potensi peningkatan jumlah permohonan layanan, gangguan sistem informasi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur.

Pada Tahun 2026 target meningkat menjadi 92%. Target tersebut diproyeksikan dapat dipenuhi dengan mempertahankan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan kualitas sistem pelayanan berbasis elektronik, dan melakukan evaluasi pelayanan secara berkala.

5. Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN

Target Tahun 2025 sebanyak 5.010 proyek berhasil dilampaui dengan realisasi 5.040 proyek atau mencapai 100,60% (Sangat Tinggi). Peningkatan jumlah proyek menunjukkan semakin baiknya iklim investasi daerah dan efektivitas pelayanan perizinan.

Hambatan yang masih dihadapi antara lain ketidakpastian ekonomi global, proses realisasi investasi yang membutuhkan waktu, serta persaingan dengan daerah lain dalam menarik investor.

Pada Tahun 2026 ditargetkan sebanyak 5.020 proyek investasi. Target tersebut diproyeksikan dapat dicapai melalui peningkatan promosi investasi, penguatan kerja sama dengan pelaku usaha, penyederhanaan pelayanan perizinan, dan pendampingan terhadap investor yang akan merealisasikan investasinya.

6. Peningkatan Jumlah Jenis Layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP)

Target Tahun 2025 sebesar 1 layanan berhasil dilampaui dengan realisasi penambahan 6 layanan, sehingga capaian mencapai 600% (Sangat Tinggi). Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik.

Hambatan yang masih dihadapi adalah perlunya penguatan koordinasi lintas instansi, penyesuaian sistem pelayanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia seiring bertambahnya jenis layanan.

Pada Tahun 2026 ditargetkan penambahan 2 jenis layanan. Mengingat capaian tahun sebelumnya yang jauh melampaui target, penambahan layanan baru diproyeksikan dapat direalisasikan sesuai target dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan, integrasi antarinstansi, serta kesiapan sarana, prasarana, dan sistem pendukung.

B. INDIKATOR PROGRAM

Berdasarkan Tabel 2.2. Secara umum, seluruh indikator program pada Tahun 2025 berhasil melampaui target dengan realisasi 100%, menunjukkan pelaksanaan program yang sangat baik. Pada proyeksi Tahun 2026, tiga indikator, yaitu pelaksanaan promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan bebas calo, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, tetap menunjukkan kinerja sangat baik.

Sementara itu, indikator realisasi investasi serta pengendalian dan pengawasan penanaman modal masih menunjukkan capaian rendah pada Triwulan I, yang mengindikasikan perlunya percepatan

pelaksanaan kegiatan dan penguatan pendampingan kepada investor agar target akhir tahun dapat tercapai. Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung, penjelasan masing-masing indikator program adalah sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi

Pada Tahun 2025, indikator Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi ditargetkan sebesar 90% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga target kinerja dapat terlampaui. Namun, pada Tahun 2026 ditetapkan target yang lebih tinggi yaitu 92%, sedangkan hingga Triwulan I realisasi baru mencapai 25% atau capaian sebesar 27,48% dengan kategori Sangat Rendah (SR). Kondisi tersebut masih wajar mengingat realisasi investasi umumnya meningkat pada triwulan III dan IV.

Faktor pendorong:

- Kinerja pelayanan perizinan yang telah memenuhi standar pelayanan.
- Pelaksanaan promosi investasi berjalan sesuai rencana.
- Dukungan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik yang mempermudah proses investasi.

Faktor penghambat:

- Sebagian besar investasi belum memasuki tahap realisasi pada awal tahun.
- Adanya penundaan pelaksanaan proyek investasi oleh investor.
- Dinamika kondisi ekonomi yang memengaruhi keputusan investasi.

Rekomendasi tindak lanjut:

- Meningkatkan pendampingan kepada calon investor hingga tahap realisasi.
- Memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha untuk percepatan investasi.
- Melakukan monitoring berkala terhadap perkembangan realisasi investasi.

2. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Pada Tahun 2025 target sebesar 90% berhasil direalisasikan 100%, sehingga melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun 2026 target

meningkat menjadi 92% dan hingga Triwulan I tetap terealisasi 100%, dengan capaian kinerja 100% (kategori Sangat Tinggi).

Faktor pendorong:

- Perencanaan kegiatan promosi yang baik.
- Koordinasi yang efektif dengan instansi terkait.
- Pemanfaatan media promosi dan forum investasi.

Faktor penghambat:

- Persaingan promosi investasi antar daerah semakin kompetitif.
- Dampak promosi terhadap realisasi investasi memerlukan waktu.

Rekomendasi tindak lanjut:

- Memperluas promosi kepada investor potensial.
- Mengoptimalkan promosi potensi unggulan Kabupaten Temanggung.
- Melakukan evaluasi efektivitas kegiatan promosi.

3. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo

Target Tahun 2025 sebesar 90% berhasil direalisasikan 100%, demikian pula pada Tahun 2026 dengan target 92%, realisasi hingga Triwulan I tetap 100% dengan capaian 100% (kategori Sangat Tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan tetap terjaga.

Faktor pendorong:

- Penerapan SOP pelayanan secara konsisten.
- Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik.
- Komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang transparan.

Faktor penghambat:

- Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelayanan mandiri.
- Potensi adanya pihak ketiga yang menawarkan jasa pengurusan perizinan.

Rekomendasi tindak lanjut:

- Mempertahankan kualitas pelayanan yang telah dicapai.
- Meningkatkan sosialisasi prosedur pelayanan kepada masyarakat.
- Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan.

4. Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pada Tahun 2025 target sebesar 90% terealisasi 100%. Untuk Tahun 2026 target meningkat menjadi 92% dan hingga Triwulan I realisasi tetap 100%, sehingga capaian indikator berada pada kategori Sangat Tinggi.

Faktor pendorong:

- Sistem informasi penanaman modal telah berjalan dengan baik.
- Pengelolaan data dilakukan secara berkala.
- Koordinasi antarbidang berjalan efektif.

Faktor penghambat:

- Masih terdapat keterlambatan penyampaian laporan dari sebagian pelaku usaha.
- Perlu peningkatan integrasi dan validasi data.

Rekomendasi tindak lanjut:

- Mengoptimalkan pemutakhiran data investasi.
- Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian laporan.
- Mengembangkan integrasi sistem informasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

Pada Tahun 2025 target sebesar 90% berhasil direalisasikan 100%. Pada Tahun 2026 target meningkat menjadi 92%, namun hingga Triwulan I realisasi baru mencapai 20% dengan capaian 0% (kategori Sangat Rendah). Rendahnya capaian disebabkan kegiatan pengawasan belum seluruhnya dilaksanakan pada awal tahun sesuai jadwal pelaksanaan.

Faktor pendorong:

- Tersedianya regulasi dan mekanisme pengawasan penanaman modal.
- Dukungan sistem pelaporan kegiatan penanaman modal.

Faktor penghambat:

- Jadwal pengawasan lapangan sebagian besar dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
- Keterbatasan sumber daya pelaksana pengawasan.
- Belum seluruh pelaku usaha menyampaikan LKPM tepat waktu.

Rekomendasi tindak lanjut:

- Mempercepat pelaksanaan kegiatan pengawasan pada triwulan berikutnya.
- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pelaporan LKPM.
- Mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko dan monitoring secara berkala.

C. INDIKATOR SPM

Indikator SPM pada DPMPTSP adalah nihil, sehingga tidak terdapat target maupun capaian SPM yang perlu dievaluasi dalam penyusunan Renja. Meskipun demikian, DPMPTSP tetap berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan, penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP), serta optimalisasi sistem pelayanan perizinan berbasis risiko untuk mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi di Kabupaten Temanggung.

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung, terdapat satu Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten. Pada Tahun 2025, target sebesar 0,60% berhasil dilampaui dengan realisasi 0,65%. Sementara itu, pada Tahun 2026 target ditingkatkan menjadi 0,70%, namun hingga Triwulan I realisasi masih sebesar 0,26%, sehingga capaian kinerja berada pada kategori Sangat Rendah (SR).

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh realisasi investasi yang belum optimal pada awal tahun dan umumnya akan meningkat pada triwulan berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan promosi investasi, fasilitasi dan pendampingan investor, serta percepatan realisasi investasi untuk mendukung pencapaian target Tahun 2026.

Faktor pendorong:

- Kualitas pelayanan perizinan tetap terjaga dengan proses yang cepat, mudah, transparan, dan sesuai standar pelayanan.

- Kegiatan promosi penanaman modal terus dilaksanakan untuk menarik minat investor.
- Tersedianya sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik yang mendukung kemudahan berusaha.

Faktor penghambat:

- Penurunan persentase investasi pada Triwulan I disebabkan realisasi investasi masih lebih rendah dibandingkan periode pembandingan, sehingga pertumbuhan investasi menjadi negatif.
- Sebagian besar proyek investasi masih dalam tahap persiapan atau konstruksi dan belum terealisasi menjadi nilai investasi.
- Kondisi ekonomi serta kehati-hatian investor dalam merealisasikan investasi turut memengaruhi capaian indikator.

Rekomendasi tindak lanjut:

- Meningkatkan pendampingan kepada calon investor dan investor yang telah memperoleh perizinan agar segera merealisasikan investasinya.
- Mengoptimalkan promosi investasi pada sektor-sektor unggulan Kabupaten Temanggung.
- Memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha untuk mendorong penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara tepat waktu.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan realisasi investasi sehingga kendala yang dihadapi investor dapat segera difasilitasi penyelesaiannya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari 12 Indikator Kinerja pada tahun 2025 seluruh indikator telah mencapai target 100%, namun di Triwulan I Tahun 2026 dari 12 Indikator terdapat 6 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (25,28%);
Hal ini dikarenakan minat investor dikarenakan kondisi KPI yang masih belum ada akses masuk,
- Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah (98,19%);
Hal ini disebabkan karena nilai AKIP tahun 2026 masih dalam proses pengumpulan data dukung;
- Indikator Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN (25,%)
Hal ini disebabkan karena prediksi minat invesatasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.
- Indikator Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN (61,43%)
Hal ini dikarenakan investasi saat ini masih didominasi oleh sektor UMKM,
- Indikator Peningkatan Jumlah Jenis Layanan di MPP (0%);
Hal ini disebabkan karena Keterbatasan Sarana Prasarana serta Sumber Daya Manusia dari Instansi yang belum bergabung.
- Indikator Persentase Pengendian dan Pengawasan Penanaman Modal (20%);
Hal ini dikarenakan Masih ada perusahaan yang belum melaporkan kegiatan usahanya.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain :

- Belum optimalnya realisasi investasi dibandingkan dengan potensi daerah, yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional maupun global serta kehati-hatian pelaku usaha dalam melakukan investasi..
- Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih belum optimal, sehingga memengaruhi kualitas data realisasi investasi.
- Masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami ketentuan perizinan berbasis risiko dan pemanfaatan sistem Online Single

Submission (OSS), sehingga memerlukan pendampingan secara berkelanjutan.

- Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis pada beberapa bidang pelayanan, pengawasan, dan penanaman modal.
 - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi sistem pelayanan dengan aplikasi pendukung dari pemerintah pusat maupun perangkat daerah lainnya.
 - Pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko masih menghadapi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta luasnya cakupan wilayah dan jumlah pelaku usaha yang harus diawasi.
 - Kegiatan promosi penanaman modal belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan anggaran, sehingga peluang investasi daerah belum seluruhnya dapat dipromosikan kepada calon investor.
 - Sarana dan prasarana pelayanan publik, termasuk fasilitas pendukung pelayanan digital dan pelayanan ramah bagi kelompok rentan, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan inklusif
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional antara lain:
- Belum optimalnya realisasi investasi berpotensi menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi bagian dari pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
 - Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mengakibatkan data realisasi investasi kurang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan evaluasi pembangunan daerah.
 - Belum optimalnya promosi investasi serta pendampingan kepada calon investor dapat mengurangi daya saing daerah dalam menarik investasi baru maupun pengembangan usaha yang telah ada.
 - Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pelayanan berpotensi memengaruhi efektivitas

pelaksanaan pelayanan perizinan, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, dan pembinaan kepada pelaku usaha.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain :

➤ Tantangan

- 1) Meningkatnya tuntutan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
- 2) Perubahan regulasi di bidang penanaman modal dan perizinan berusaha yang memerlukan penyesuaian kebijakan, prosedur, serta peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana dalam mendukung optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan promosi investasi.
- 4) Belum optimalnya integrasi sistem informasi pelayanan perizinan dengan sistem pemerintah pusat maupun perangkat daerah teknis.
- 5) Masih rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dan kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- 6) Persaingan antardaerah dalam menarik investasi yang semakin ketat sehingga diperlukan peningkatan daya saing dan inovasi pelayanan.

➤ Peluang untuk dapat meningkatkan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

- 1) Penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS memberikan peluang untuk mempercepat proses pelayanan perizinan dan meningkatkan kemudahan berusaha.
- 2) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong reformasi birokrasi, transformasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 3) Potensi sumber daya alam, sektor pertanian, agroindustri, pariwisata, UMKM, dan sektor unggulan Kabupaten Temanggung yang masih terbuka untuk dikembangkan sebagai daya tarik investasi.

- 4) Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik sehingga mendukung pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
- 5) Peluang penguatan kerja sama dengan perangkat daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga keuangan, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan investasi daerah.
- 6) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha membuka peluang untuk meningkatkan kepatuhan perizinan, penyampaian LKPM, dan pembinaan usaha secara berkelanjutan.
- 7) Tersedianya peluang promosi investasi melalui berbagai media digital, forum investasi, dan kemitraan strategis untuk memperluas jangkauan calon investor.

5. Formulasi isu-isu penting

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026, isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi peningkatan realisasi investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan komitmen perizinan dan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Penguatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui peningkatan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian terhadap pelaku usaha.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan inovasi pelayanan publik untuk mendukung transformasi digital.

- Penguatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan dalam mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi.
- Peningkatan kualitas data dan informasi penanaman modal sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
- Pengembangan potensi dan promosi investasi daerah yang didukung oleh penyediaan informasi peluang investasi yang akurat dan mudah diakses.
- Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal guna mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Temanggung serta sasaran pembangunan daerah.

2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agar usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari User sekretariat DPRD sampai dengan user Perangkat daerah adalah untuk memastikan kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pokok Pikiran DPRD Nihil sebagai mana tersebut dalam table 2.6.

Tabel 2.5
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
	NIHIL		

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, 2026

2.5 *Review terhadap rancangan awal RKPD*

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

- 1. Tidak terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6.
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							RANCANGAN AWAL RKPD 2027 (HASIL ANALISIS KEBUTUHAN)							KET
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	1.500.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21	Dokumen	1.500.000	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah			2.426.574.625		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah			2.426.574.625	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang/bulan	2.426.574.625		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang/bulan	2.426.574.625	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	Orang	100.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	100.000.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			126.498.950		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			126.498.950	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	6.498.950		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	6.498.950	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	30.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027								RANCANGAN AWAL RKPD 2027 (HASIL ANALISIS KEBUTUHAN)							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	KET
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	60	Paket	30.000.000			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	75	Paket	30.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	30.000.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	30.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	30.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	30.000.000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			524.783.800			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			524.783.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	115.500.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	115.500.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	25.000.000			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	384.283.800			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	384.283.800	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.000.000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	15.000.000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							RANCANGAN AWAL RKPD 2027 (HASIL ANALISIS KEBUTUHAN)							KET
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			114.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			114.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13	Unit	80.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13	Unit	80.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	Unit	19.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	Unit	19.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1	Unit	15.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1	Unit	15.000.000	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	94	%	51.000.000		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	94	%	51.000.000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Tersediannya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota			6.000.000		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Tersediannya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota			6.000.000	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2	Dokumen	6.000.000		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2	Dokumen	6.000.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			-		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			-	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	45.000.000		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	45.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							RANCANGAN AWAL RKPD 2027 (HASIL ANALISIS KEBUTUHAN)							KET
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	94	%	118.502.000		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			94	%	118.502.000	
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota					118.502.000		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota					118.502.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	108.502.000		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	108.502.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota	1	Dokumen	10.000.000		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota	1	Dokumen	10.000.000	
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	94	%	117.000.000		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			94	%	117.000.000	
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			117.000.000		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			117.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasiitas/ Insentif Daerah	Kabupaten Temanggung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif Daerah	1	Dokumen	10.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasiitas/ Insentif Daerah	Kabupaten Temanggung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif Daerah	1	Dokumen	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							RANCANGAN AWAL RKPD 2027 (HASIL ANALISIS KEBUTUHAN)							KET
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11100	Pelaku Usaha	100.000.000		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11100	Pelaku Usaha	100.000.000	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100	Pelaku Usaha	7.000.000		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100	Pelaku Usaha	7.000.000	
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Temanggung	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	94	%	50.000.000		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			94	%	50.000.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	
	Penyelesaian Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kabupaten Temanggung	Jumlah PenyelesaianPermasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan KegiatanUsahanya	5	Kegiatan usaha	5.000.000		Penyelesaian Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kabupaten Temanggung	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	5	Kegiatan usaha	5.000.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	90	Pelaku USaha	40.000.000		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan	90	Pelaku USaha	40.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							RANCANGAN AWAL RKPD 2027 (HASIL ANALISIS KEBUTUHAN)							KET
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
										Berusaha Berbasis Risiko				
	Pengawasan Penanaman Modal	Kabupaten Temanggung	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50	Kegiatan Usaha	30.000.000		Pengawasan Penanaman Modal	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	50	Kegiatan Usaha	30.000.000	
JUMLAH								JUMLAH					3.644.859.375	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

Tabel 2.7
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Temanggung

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, 2026

2.7 Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada 20 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2023-2026

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	JEMPOL BOSS	DPMPTSP	APBD	Kegiatan pembuatan NIB untuk pelaku usaha UMKM terutama di luar Kecamatan Temanggung untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan izin usaha (NIB)	Pembuaan NIB UMKM	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Teanggung	2023-2026
2	KARPARK	DPMPTSP		Memastikan pemohon yang datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten Temanggung mendapatkan kartu parkir agar pemohon lebih nyaman dan tenang saat melakukan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Temanggung	Kartu Parkir untuk Pemohon	Terlaksananya keamanan dan keyamanan Pelayanan di MPP	2023-2026
3	QR CODE PBG	DPMPTSP	APBD	Plakat Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan DPMPTSP tidak lagi diketik secara manual terkait data bangunan gedungnya,	QR CODE pada Plat PBG	mempermudah pengawasan bangunan gedung	2023-2026

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
				melainkan sudah menggunakan QR CODE			
4	NGOBRAS (Ngobrol Santai)	DPMPTSP		Obrolan santai kemajuan kinerja pegawai DPMPTSP	Peningkatan Kinerja Pegawai	Untuk menumbuhkan rasa persaudaraan yang tinggi dan meningkatkan kinerja semua pegawai	2023-2026
5	SIBARENG (Sistem Informasi Pembayaran Retribusi Bangunan Gedung)	DPMPTSP		pembayaran untuk membantu proses pembayaran retribusi PBG dengan kode bayar yang dikirim ke akun SIMBG pemohon secara langsung	Pembayaran Ritribusi PBG	Mempermudah proses pembayaran ritribusi PBG	2023-2026
6	TUAN KAMI (Waktu Anda Kami Hargai)	DPMPTSP		Pelayanan Penambahan 1 KBLI di OSS-RBA khusus untuk UMK hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit	Pelayanan NIB	Meningkatkan pelayanan penambahan KBLI di OSS-RBA	2023-2026
7	LAPOR BU! (Layanan Pendampingan OSS RBA Badan Usaha)	DPMPTSP		Membantu pelaku usaha dengan melakukan pendampingan pembuatan NIB khusus Badan Usaha setiap hari Selasa dan Kamis	Pembuatan NIB	Meningkatnya pelayanan pendampingan pembuatan NIB khusus Badan Usaha	2023-2026
8	BOSUKMA (Barcode Survey Kepuasan Masyarakat)	DPMPTSP		Mempermudah masyarakat dalam memberikan penilaian kepada DPMPTSP dengan memberikan barcode SKM di meja pelayanan.	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	2023-2026
9	CAKITAS (Catatan kaki Integritas)	DPMPTSP		Membubuhi <i>footnote</i> atau catatan kaki untuk seluruh surat keluar yang menginformasikan bahwa “Pegawai DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap”	Cetakan Kaki dalam surat untuk pencegahan Grafitikasi dan suap	Meningkatkan budaya anti korupsi	2023-2026
10	LAZOOM	DPMPTSP		Layanan Via Zoom Pelayanan 24/7bagi masyarakat untuk layanan konsultasi secara daring melalui aplikasi ZOOM	Konsultasi melalui aplikasi Zoom	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	2023-2026
11	24/7	DPMPTSP		Pelayanan Selain Jam Kerja Via Whatsapp	Pelayanan Konsultasi	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	2023-2026
12	LAYANAN MULTIHILIX	DPMPTSP		LayananPermohonan Izin tanpa turun dari kendaraan (Latatur/Layanan Tanpa Turun)	Pelayanan MPP	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	2023-2026

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
13	SIAP TANAM	DPMPTSP		Aksi Pendampingan Penanaman Modal	Pendmpingan Pemoon	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	2023-2026
14	GAMPIL	DPMPTSP		Gerakan Pendampingan Pelayanan Perizinan	Pendampingan Pemohon	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	2023-2026
15	SIPITE	DPMPTSP		Sistem Informasi Potensi Investasi Kabupaten Temanggung	Potensi Investasi	Meningkatnya investasi daerah	2023-2026
16	SIPDEG	DPMPTSP		Sistem Presensi dengan GPS	Absensi Petugas Gerai MPP	Meningkatnya disiplin pegawai	2023-2026
17	POP-INVEST	DPMPTSP		Pesan Otomatis Promosi Investasi Temanggung		Meningkatnya investasi daerah	2023-2026
18	RETALIA TE	DPMPTSP		Rekap Data Online dan Terintegrasi	Informasi data DPMPTSP	Meningkatnya Kinerja Dinas	2023-2026
19	OME GOOD	DPMPTSP		One Minute Education Good	Informasi Media Sosial	Meningkatnya Kinerja Pegawai	2023-2026
20	Si KOALA	DPMPTSP		Solusi Kolaboatif untuk Sinkronisasi Data Reklame	Data reklame	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	2023-2026

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, 2026

2.8 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada 16 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2026

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Kementrian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokari	Nasional	DPMPTSP
2.	Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Nilai : 95,40 (Kualitas Tertinggi)	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	Nasional	DPMPTSP
3.	Peringkat 13 Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Kementerian Ivestasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Nasional	DPMPTSP
4.	Juara I KRENOVA	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	DPMTSP
5.	Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	DPMPTSP

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
6.	Peringkat 13 Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	DPMPTSP
7.	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	DPMPTSP
8	Top Finalis Inovasi Pelayanan Publik	KEMENPAN-RB	NASIONAL	DPMPTSP
9	Predikat PRIMA Evaluasi MPP Tahun 2025	KEMENPAN-RB	NASIONAL	DPMPTSP
10	Top 10 Inovasi Jempol Boss Menuju UMKM Naik Kelas Tahun 2025	BRIDA JATENG	PROVINSI	DPMPTSP
11	Top 10 Inovasi GAMPIL Tahun 2025	BRIDA JATENG	PROVINSI	DPMPTSP
12	Kategori A Penilaian AKIP Tahun 2025	PEMKAB. TEMANGGUNG	KABUPATEN	DPMPTSP
13	Peringkat 1 Kategori Website Perangkat Daerah Tahun 2025	PEMKAB. TEMANGGUNG	KABUPATEN	DPMPTSP
14	Predikat Admin PPID Proaktif Tahun 2025	PEMKAB. TEMANGGUNG	KABUPATEN	DPMPTSP
15	Peringkat Pertama KRENOVA Kategori Perangkat Daerah Tahun 2025	BAPPEDA TEMANGGUNG	KABUPATEN	DPMPTSP
16	Peringkat Ketiga KRENOVA Kategori ASN Tahun 2025	BAPPEDA TEMANGGUNG	KABUPATEN	DPMPTSP

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, 2026

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPMPTSP tidak secara langsung melaksanakan program prioritas nasional yang memiliki target pelayanan dasar sebagaimana Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun demikian, DPMPTSP memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta peningkatan realisasi penanaman modal di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, serta Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2025–2029. Kebijakan tersebut menempatkan investasi sebagai salah satu pengungkit utama transformasi ekonomi melalui peningkatan investasi yang berkualitas, hilirisasi industri, transformasi digital, kemudahan berusaha, dan peningkatan daya saing daerah.

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, DPMPTSP Kabupaten Temanggung berperan dalam mendukung peningkatan investasi melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, terintegrasi, dan akuntabel, optimalisasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), peningkatan promosi potensi investasi daerah, fasilitasi penanaman modal, serta pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025-2029 adalah “Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Proyek Investasi dan Meningkatnya jumlah layanan di MPP (Mal Pelayanan Perizinan) ”.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)			Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar	2.155	2.160
	Meningkatnya Proyek Investasi		Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN (Proyek)	Proyek	5.030	5.050
	Meningkatnya jumlah layanan di MPP (Mal Pelayanan Perizinan)		Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP (Layanan)	Layanan	4	8
			Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan (%)	Persen	94	97
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Persen	95,5	96,5
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	Persen	94	98
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Persen	94	98
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	Persen	94	98
			Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	94	98
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	Persen	94	98

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong peningkatan investasi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara umum, pada tahun perencanaan DPMPTSP melaksanakan **5 program** yang dijabarkan ke dalam **12 kegiatan** dan **25 subkegiatan**. Program-program tersebut meliputi program penunjang urusan pemerintahan daerah serta program yang secara langsung mendukung urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyebaran lokasi pelaksanaan program dan kegiatan pada umumnya mencakup seluruh wilayah kabupaten Temanggung. Kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan secara terpusat di kantor DPMPTSP dengan dukungan sistem pelayanan berbasis elektronik, sedangkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Promosi Investasi, dan Fasilitasi Penanaman Modal dilaksanakan di berbagai wilayah sesuai dengan lokasi pelaku usaha maupun potensi investasi yang dikembangkan. Dengan demikian, karakteristik penyebaran kegiatan bersifat terpusat untuk pelayanan administrasi dan tersebar (spread) pada seluruh wilayah Kabupaten Temanggung untuk kegiatan pembinaan, pengawasan, dan promosi investasi.

Total kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan DPMPTSP sebesar **Rp 3.610.192.032**, yang bersumber dari:

- Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar **Rp3.510.192.032,00;**
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar **Rp100.000.000,00.**

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pengembangan Sistem Informasi Perizinan, Promosi Penanaman Modal, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha, serta Pelaksanaan Fungsi Penunjang Perangkat Daerah. Komposisi pendanaan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2027.

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung Tahun 2027

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal														
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian				95,5%				3.610.192.032	DAU		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	95%	3.668.233.536
2.18.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Kabupaten Temanggung	95,5		7 Dokumen			DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	1.500.000
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen		1.500.000	DAU			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	1.500.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung			294 Orang	2.345.666.263	DAU			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang	2.345.666.263
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan		150.000.000	DBHCHT			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	150.000.000
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Temanggung			150 Orang	150.000.000	DBHCHT			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	150.000.000
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang		150.000.000	DBHCHT			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	150.000.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Temanggung			160 Laporan	126.500.000	DAU			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	160 Laporan	139.000.000
				Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				60 Laporan					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	60 Laporan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027						Catan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				Konsultasi SKPD								Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	
				Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				60 Paket				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	
				Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 laporan		6.500.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.000.000
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor				12 Paket		30.000.000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	33.000.000
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				60 Paket		30.000.0000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	33.000.000
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan		30.000.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	170 Laporan	33.000.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan		30.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	33.000.000
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung			21 Unit	177.000.000	DAU		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit	343.067.273
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21 Unit		177.000.000	DAU		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit	343.067.273

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	577.500.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	580.500.000
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan		DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan		150.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Laporan		25.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	25.000000
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan		402.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	405.000.000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Temanggung		19 Laporan	Kabupaten Temanggung	203.500.000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	108.500.000
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		
				Dipelihara/Direhabilitasi								Dipelihara/Direhabilitasi		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				Dipelihara/Direhabilitasi										
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			15 Unit		80.000.000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	85.000.000	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3 Unit		15.000.000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	13.500.000	
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Unit		19.000.000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi				94%			100.070.000	DAU		Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	96%	101.378.515
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kabupaten Temanggung			2 Dokumen						
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			2 Dokumen		6.004.200	DAU		Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 dokumen	6.004.200	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung									
2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota			1 Dokumen		94.065.800	DAU		Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi yang disusun	1 dokumen	95.34.315	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal				1 Dokumen			850.350.000	DAU		Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	96%	862.169.865

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung			1 Dokumen	500.300.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang tersusun	1 Dokumen	850.350.000
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokmen		500.300.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi yang dilaksanakan	1 Dokumen	501.301.863
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota				1 Dokumen		350.050.000	DAU		Jumlah Dokumen Strategi Promosi yang disusun	1 Dokumen	360.865.002
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				94%			212.148.400	DAU		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	96%	215.097.263
												Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	96%	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung			1 Dokumen	212.148.400	DAU		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				11.100 Pelaku Usaha		DAU		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	11.150 pelaku Usaha	
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 pelaku Usaha		DAU		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	75 Pelaku Usaha	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen		12.000.000	DAU		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.000.000
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				11.100 Pelaku Usaha		193.148.400	DAU		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	11.150 Pelaku Usaha	196.097.263
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha		7.000.000	DAU		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	75 Pelaku Usaha	7.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal				94%			99.069.300	DAU		Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	96%	100.446.363
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pengendalian Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Kabupaten Temanggung			1 Dokumen	99.069.300	DAU				100.446.363
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				90 Pelaku Usaha		59.069.300	DAU		Jumlah Pelaku Usaha yang Telah mengikuti Bimbingan teknis perizinan	90 Pelaku Usaha	60.446.363

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha				35 Pelaku Usaha		20.000.000	DAU		Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasii kegiatan usaha	40 Pelaku Usaha	20.000.000
2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya				9 pelaku Usaha		20.000.000	DAU		Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	10 Pelaku Usaha	20.000.000
									3.610.192.032					3.668.233.536

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027 tidak mengalami perubahan kembali.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung Tahun 2027

RANCANGAN RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	
(1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	(1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.426.574.625	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.426.574.625	
(2)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.426.574.625	(2)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.426.574.625	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
(3)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	(3)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.498.950	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.498.950	
(4)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.498.950	(4)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.498.950	
(5)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	(5)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	
(6)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	(6)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	
(7)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	(7)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	
(8)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	(8)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.783.800	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.783.800	
(9)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.500.000	(9)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.500.000	
(10)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	(10)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	
(11)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	384.283.800	(11)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	384.283.800	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	
(12)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	15.000.000	(12)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	15.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.000.000	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.000.000	
(13)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	(13)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	

RANCANGAN RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
(14)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.000.000	(14)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.000.000	
(15)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	(15)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	51.000.000	II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	51.000.000	
8	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	6.000.000	8	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	6.000.000	
(16)	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	6.000.000	(16)	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	6.000.000	
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	=45.000.000	9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	=45.000.000	
(17)	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang UsahaKabupaten/Kota	45.000.000	(17)	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang UsahaKabupaten/Kota	45.000.000	
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	118.502.000	III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	118.502.000	
10	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	118.502.000	10	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	118.502.000	
(18)	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	108.502.000	(18)	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	108.502.000	
(19)	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	10.000.000	(19)	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	10.000.000	
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	117.000.000	IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	117.000.000	
11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	117.000.000	11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	117.000.000	
(20)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasiitas/ Insentif Daerah	10.000.000	(20)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasiitas/ Insentif Daerah	10.000.000	
(21)	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000	(21)	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000	
(22)	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	7.000.000	(22)	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	7.000.000	
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	50.000.000	V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	50.000.000	
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000	12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000	
(23)	Penyelesaian Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	5.000.000	(23)	Penyelesaian Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	5.000.000	
(24)	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	40.000.000	(24)	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	40.000.000	

RANCANGAN RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
(25)	Pengawasan Penanaman Modal	30.000.000	(25)	Pengawasan Penanaman Modal	30.000.000	
	JUMLAH	3.644.859.375		JUMLAH	3.644.859.375	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2027

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa pagu indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada rancangan Renja telah sesuai dengan pagu indikatif yang dialokasikan dalam RKPD Kabupaten Temanggung. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan atau perubahan pagu indikatif antara kedua dokumen tersebut.

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
V	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH				
	Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar				
17	Penanaman Modal				
1	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Milyar	2.159	2,155	DPMPTSP
2	Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan	%	100	93	DPMPTSP
3	Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN	Proyek	13.586	5.030	DPMPTSP

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2.
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								
18	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten	%	0,69	0,20	DPMPTSP
				Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten				

BAB VI

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 90,81 %, realisasi Belanja Modal sebesar 91,66 %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 21,59 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0%,

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp3.644.859.375,- yang terdiri dari 5 program antara lain program Pengembangan Iklim Investasi; Program Promosi Penanaman Modal; Program Pelayanan Penanaman Modal; Program

Pengendalian Pelaksanaan, Penanaman Modal; dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 20 Juli 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196812101990011001